

Implementasi E-Tilang Dalam Meningkatkan Disiplin Ber Lalu Lintas Masyarakat di Kabupaten Bojonegoro

Novi Amilia Rohmatin¹, Junadi², Ida Sawasanti³, Cahya Lukito⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bojonegoro, Indonesia

*Coressponding author: noviamalia144@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima [01 Desember 2024]

Revisi [28 Desember 2024]

Diterbitkan [30 Januari 2025]

KATA KUNCI

Implementasi; E-tilang; Disiplin Ber Lalu Lintas

KEYWORDS

Implementation; E-ticketing Traffic Discipline

This work is licensed under a:



ABSTRAK

Pelanggaran lalu lintas adalah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan terhadap aturan lalu lintas. Bojonegoro merupakan salah satu Kabupaten yang masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas. Polri telah mengembangkan sebuah sistem informasi berbasis jaringan atau situs WEB yang dikenal sebagai tilang elektronik atau E-Tilang yang juga di Implementasikan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bojonegoro untuk mengedepankan penindakan tilang dengan tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi E-Tilang dalam meningkatkan disiplin ber lalu lintas masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Jenis penelitian yang digunakan dengan Metode Penelitian Kualitatif dengan menggunakan Teori George C EDWARD III yaitu: (1) Komunikasi (2) Sumber Daya (3) Disposisi (4) Struktur Birokrasi. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa wawancara, observasi, pengambilan dokumen dan kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Tilang di Kabupaten Bojonegoro sudah mampu menekan angka pelanggar lalu lintas tetapi masih ada beberapa masalah atau perlunya peningkatan di antaranya Sosialisasi kepada masyarakat guna juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap elektabilitas petugas serta Infrastruktur terkait sarana dan prasarana dalam menunjang Implementasi yang masih di rasa kurang cukup untuk mendukung Implementasi ini agar lebih efektif.

ABSTRACT

Traffic violations are any violations committed by road. Bojonegoro is one of the regencies where there are still many traffic violations. The National Police has developed a network-based information system or WEB website known as Electronic Ticketing or E-Tilang which is also implemented by the Traffic Unit (Satlantas) of the Bojonegoro Police to prioritize the enforcement of ticketing with electronic ticketing or *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). The purpose of this study is to find out how the implementation of E-Tilang in improving traffic discipline in Bojonegoro Regency. The types of research used with Qualitative Research Methods using George C EDWARD III Theory are: (1) Communication (2) Resources (3) Disposition (4) Bureaucratic Structure. Data was collected using instruments in the form of interviews, observations, document retrieval and questionnaires. The results of the study show that E-Tilang in Bojonegoro Regency has been able to reduce the number of traffic violators, but there are still several problems or the need for improvement, including socialization to the community in order to also increase public confidence in the electability of officers and infrastructure related to facilities and infrastructure in supporting the implementation which is still felt to be insufficient to support this implementation to be more effective.

Pendahuluan

Disiplin berlalu lintas di Indonesia sebagai suatu sikap penting yang perlu dibiasakan bagi semua pengendara motor atau mobil agar selamat sampai tujuan. Baik keselamatan bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Pengendara penting untuk disiplin karena disiplin berhubungan dengan peraturan. Untuk menjaga ketertiban dalam berlalu lintas, penting bagi polisi untuk menegakkan aturan dan sanksi kepada pelanggar. Pelanggaran lalu lintas tidak boleh diabaikan karena seringkali disebabkan oleh ketidakpatuhan manusia terhadap peraturan. Namun penindakan pelanggaran lalu lintas merupakan tantangan bagi polisi agar dapat memberikan efek jera. Salah satu cara untuk memberikan efek jera untuk menekan sebuah pelanggaran yaitu dengan memberikan sanksi administratif atau disebut tilang.

Bojonegoro merupakan salah satu Kabupaten yang masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas, karena masih banyak masyarakat yang kurang berdisiplin dan tidak menaati adanya peraturan peraturan berlalu lintas yang baik dan benar. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bojonegoro untuk mengedepankan penindakan tilang dengan tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, Dalam konteks instruksi atau kebijakan yang melarang penindakan tilang manual, Bapak Kapolri berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Prinsipnya adalah untuk mencegah terjadinya interaksi antara pelanggar dan petugas, sehingga tidak ada kesempatan bagi pelanggaran atau suap antara pihak terkait, serta untuk mencegah anggota polisi melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti dengan anggota Satlantas Polres Bojonegoro yaitu Bapak Siswanto Penerapan ETLE di bagi menjadi dua yaitu dengan CCTV dan mobil incar. CCTV yang di pasang di ruas-ruas lampu merah atau *traffic light*, yakni berada di ruas Jalan Rajekwesi, Jalan Untung Suropati, Jalan Diponegoro, dan Jalan Teuku Umar. Akan tetapi belum beroperasi dikarenakan belum terconnect dengan Korlantas Polri. Mobil incar yang di lengkapi dengan sensor CCTV, sampai sekarang masih tetap berjalan. 2 mobil INCAR yang digunakan.

Mobil Incar akan berjalan setiap hari pada saat siang hari sambil melakukan patroli. Dibagi menjadi dua bagian yaitu ke arah barat dan ke arah timur dikarenakan keterbatasan mobil incar. Mobil icar dilengkapi dengan teknologi yang memungkinkan identifikasi wajah, nomor polisi kendaraan, lokasi, serta pelanggaran lalu lintas. Selain itu, mobil ini dilengkapi dengan kamera canggih yang dapat merekam secara langsung dan mengumpulkan data kendaraan secara otomatis yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, dengan koneksi ke sistem registrasi dan identifikasi. Bukan hanya plat Kabupaten Bojonegoro, plat luar Daerah atau Kabupaten juga bisa terdeteksi dengan mobil incar.

Penggunaan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* melalui mobil incar di Bojonegoro telah dimulai sejak Januari 2022. Selama periode tersebut hingga 4 Februari 2022, Satlantas Polres Bojonegoro telah mencatat 296 pelanggaran, akan terus berjalan setiap harinya. Berikut ini merupakan jumlah data tilang yang dilakukan di Satlantas Polres Bojonegoro dari tahun 2019-2023 :

Tabel 1. Data Jumlah Tilang

No	TAHUN	JUMLAH TILANG
1.	2019	18.344
2.	2020	16.378
3.	2021	4.247
4.	2022	3.805
5.	2023	1.394

Sumber : Satlantas Polres Bojonegoro, 2024

Dari tabel diatas, dapat dikatakan bahwa semakin tahun tilang jumlahnya semakin berkurang atau mengalami penurunan Tetapi juga masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas. Dari data tersebut tak kurang juga upaya anggota kepolisian untuk selalu menekankan disiplin berlalu lintas kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro

Namun ada beberapa masalah dari penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) di kota Bojonegoro, diantaranya adalah persepsi masyarakat diadakannya tilang elektronik ini belum sepenuhnya setuju karena sebagian masyarakat masih banyak yang belum tau akan diadakannya tilang elektronik terutama desa pedalaman di wilayah Bojonegoro dan menganggap bahwa tilang elektronik hanya wacana pemerintah yang berlaku hanya sementara. Dilihat dari penerapannya yang belum maksimal dan penindakan yang kurang tegas masyarakat tidak mempedulikan adanya CCTV yang berada di beberapa ruas jalan kota Bojonegoro. Masih banyak kendala sebab tidak semua wilayah yang ada di Kabupaten Bojonegoro dapat di awasi E-Tilang, Kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai pengurusan dan penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang), Banyak masyarakat yang masih bingung dengan cara pembayarannya karena tidak semua kalangan masyarakat paham tentang teknologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) melalui mobil incar di Kabupaten Bojonegoro, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan penerimaan masyarakat terhadap sistem tilang elektronik ini. Implementasi merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Januwarso, 2017). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi ETLE, termasuk kurangnya sosialisasi, keterbatasan cakupan wilayah pengawasan, serta kesulitan masyarakat dalam memahami dan menggunakan teknologi terkait. Selain itu, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penerapan tilang elektronik guna meningkatkan kesadaran dan disiplin berlalu lintas di Bojonegoro.

Metode

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang situasi atau kejadian, sehingga data yang dikumpulkan bersifat deskriptif. Fokus penelitian menurut Moelong (2006:7) adalah sebagai pusat perhatian yang dimaksud membatasi suatu permasalahan yang diteliti agar tidak terjadi pembiasaan yang

mempersiapkan dan mengkaji masalah yang diteliti. Dalam setiap penelitian yang akan diteliti fokus penelitian guna mempermudah peneliti dengan adanya pemusatan objek yang akan diteliti di lapangan, sehingga peneliti tidak menyimpang atau kehilangan arah dari permasalahan. Fokus penelitian ini mengacu pada Implementasi E-Tilang dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang menggunakan teori Georgel C Edwards terdiri dari 4 indikator antara lain akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi, berkaitan dengan adanya koordinasi antar Lembaga dan penyampaian informasi tentang Implementasi E-tilang dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas masyarakat Kabupaten Bojonegoro dari pelaksana kebijakan yaitu Anggota Satlantas Polres Bojonegoro dan masyarakat umum.
2. Sumber daya, merupakan faktor terpenting untuk menunjang implementasi, terdiri dari infrastruktur, sumber daya manusia, dan dana yang diberikan terkait Implementasi E-tilang dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas masyarakat Kabupaten Bojonegoro.
3. Disposisi, berkaitan dengan dukungan pimpinan, kesiapan antar petugas, dan kerjasama antar lembaga untuk menilai kinerja dalam Implementasi E-tilang dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas masyarakat Kabupaten Bojonegoro.
4. Struktur birokrasi, berkaitan dengan wewenang, tanggung jawab, meliputi SOP dan fragmentasi terhadap pencapaian tujuan Implementasi E-tilang dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses dimana peneliti mencari data dan informasi yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian yang akan dikerjakan. Adapun dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui sebagai berikut: Studi kepustakaan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi, Studi lapangan, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : Observasi, Wawancara, Dalam konteks ini, wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang di rancang dengan cermat untuk menjawab hipotesis yang telah diformulasikan. Dokumentasi, juga dilakukan untuk memperoleh data tertulis dari berbagai sumber, terutama dokumen pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, seperti undang-undang, surat kabar, laporan penelitian, dan sebagainya. Oleh karena itu, laporan penelitian mencantumkan kutipan data untuk memberikan gambaran mengenai penyajian laporan.

Model analisis data menurut Sugiyono (2018) analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun dengan sistematis dengan memperoleh data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Cara yang dilakukan dalam mengorganisasikan data yaitu memasukan kedalam kategori, dijabarkan pada unit-unit, menentukan yang penting dan yang akan dipelajari, lalu membuat kesimpulan agar mudah dipahami. Secara umum, dalam penelitian kualitatif, banyak peneliti menggunakan model analisis yang di cetuskan oleh (Matthew B. Miles dan A Michael Huberman, 1992) yang sering disebut sebagai pendekatan analisis data interaktif. Mereka menunjukkan bahwa proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga selesai. Proses ini terdiri dari tiga tahap yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil dan olahan data penelitian maka dapat di analisis dengan teori sebagai berikut :

1. Komunikasi

Pada variable yang pertama yang menentukan keberhasilan Impelentasi suatu kebijakan dimana Suatu kebijakan akan sampai pada masyarakat jika masyarakat mengerti dan memahami apa yang sedang di implementasikan oleh impelementor. Jika kita melihat hasil penelitian dan paparan data baik berupa data olahan maupun hasil wawancara dengan beberapa informan pada Impelemnetasi E- Tilang di wilayah Kabupaten Bojonegoro maka menunjukkan keterangan yang berbeda, dimana pihak Polantas menunjukkan bahwa meraka sudah melakukan giat sosialisasi meyampaikan kepada mayarakat terkait dengan E-Tilang dengan berbagai media baik online maupun offline, bahkan melakukan sosialisasi secara konvensional dengan turun ke masyarakat dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat agar informasi ini dapat di terima dan dipahami oleh target implementasi kebijakan tersebut.

Keterangan ini terjadi menandakan bahwa sosialisasi ini belum tersebar luas ke segala lini masyarakat, bahkan ada masyarakat yang masih meragukan keberhasilan dari penerapan E-Tilang sesuai dengan target implementasinya. Variatif Saluran menunjukkan dari data penelitian bahwa terdapat beberapa pilihan saluran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi E-Tilang kepada publik, seperti media massa, media sosial, papan pengumuman, dan aplikasi mobile yang harus di teruskan dan di tingkatkan terutama kepada target gen-Z atau milenial yang cenderung konsumtif dengan social media saat ini dan harus mengandung unsur yang menarik dengan mengikuti trend anak muda saat ini agar apa yang ingin di targetkan tercapai.

Pihak POLANTAS juga selalu Memastikan aksesibilitas saluran komunikasi yang dipilih, menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan akses teknologi, hal ini perlu di perhatikan terutama untuk para generasi yang di bilang gptek terhadap social media , memang kenyataannya banyak orangtua yang menggunakan gadget tetapi hal ini perlu di pahami bahwa konsumtif terhadap sosmed di beberapa hal tertentu. Terlepas dari bentuk dan monitoring komunikasi yang dilakukan juga menunjukkan bagaimana Kesesuaian Saluran dengan cara Memilih saluran komunikasi yang sesuai dengan target audiens, mempertimbangkan preferensi dan kebiasaan mereka dalam menerima informasi, sebelum menentukan dengan apa akan melakukan sosialisasi pihak POLANTAS hendaknya perlu mengidentifikasi terlebih dahulu target dan ketercapaian dalam kategori seperti apa, pentingnya melakukan riset lapangan secara berkelanjutan.

Mempertimbangkan budaya dan norma sosial yang berlaku di masyarakat saat merancang strategi komunikasi E-Tilang , terlepas dengan metode yang di terpakan menggunakan apa Polantas perlu menimbang budaya masyarakat bojonegoro terutama antara masyarakat Desa dan Kota yang juga beda dalam pemahaman karena perbedaan budaya di dalamnya. Menyesuaikan strategi komunikasi dengan tingkat literasi dan akses informasi masyarakat, belum adanya sosialisasi dengan terjun ke masyarakat langsung dalam lingkup tertentu , seperti jika target anak sekolah maka penting untuk memberikan sosialisasi secara langsung di sekolah atau menerapkan E-Tilang di wilayah dekat sekolah agar lebih sampai kepada target. Mempertimbangkan kondisi politik dan ekonomi yang dapat memengaruhi efektivitas komunikasi E-Tilang, dalam hal

ini perlu di lihat menerapkan E-Tilang di Dekat Pasar misal , hal ini akan berpotensi terhadap pandangan masyarakat dengan membenci implementor sehingga hubungan masyarakat dengan Polantas akan terpecah dan tidak terjalin. Mengapa begitu karena wilayah pasar merupakan wilayah lalulalang yang paling banyak mobilitas dari masyarakat yang pastinya banyak melanggar contohnya : tidak memakai helm ,karena dinilai dengan jarak yang dekat dan terbiasa ketika bekerja di pasar tidak safety sesuai peraturan lalu lintas.

Dengan memperhatikan dan mengelola variabel-variabel komunikasi ini secara efektif, implementasi E-Tilang dapat meningkatkan pemahaman publik, mendorong partisipasi dan dukungan, dan ultimately berkontribusi pada tercapainya tujuan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan keselamatan jalan raya yang berpotensi untuk menekan angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

2. Sumber Daya

Alokasi sumber daya yang memadai sangat penting untuk keberhasilan operasi dan pemeliharaan infrastruktur dan sistem E-Tilang di Kabupaten Bojonegoro . Ini meliputi **Variabel sumber daya** mengacu pada berbagai elemen dan faktor yang berkaitan dengan ketersediaan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk implementasi E-Tilang yang sukses. Infrastruktur Teknologi: Ketersediaan perangkat keras yang memadai, seperti kamera pengawas berkualitas tinggi, sistem penyimpanan data yang andal, dan perangkat lunak yang kompatibel. Jika melihat hasil penelitian dan jumlah data CCTV di wilayah Kabupaten Bojonegoro masih terbilang kurang bahkan kegunaanya secara signifikan dalam peruntukan khusus E-Tilang jadi otomatis pemantauan tidak bisa focus , dengan jumlah 28 CCTV hal ini hanya bisa mengakomodir wilayah Kota saja tidak untuk keseluruhan wilayah Kabupaten Bojonegoro yang juga perlu bahkan berhak untuk mendapatkan perhatian tersebut bahkan adanya CCTV di Beberapa titik Kota belum bisa beroperasi sesuai dengan kegunaanya semestinya. Sumber Daya Manusia: Memastikan personel yang cukup dan terlatih dengan baik untuk mengoperasikan sistem E-Tilang, memantau pelanggaran lalu lintas, dan memproses prosedur penegakan hukum. Jumlah personel yang memadai dengan kualifikasi dan pelatihan yang sesuai untuk mengoperasikan sistem E- Tilang, memantau pelanggaran lalu lintas, dan memproses penegakan hukum. Jika melihat ketersediaan SDM pada POLANTAS maka tidak di ragukan lagi secara kuantitatif karena mereka merupakan Lembaga negara yang independent di bawah langsung presiden serta selal melakukan rekrutmen setiap tahun yang terstruktur maka sudah pasti ketersediaannya mencukupi, tetapi permasalahan nya terletak pada kompetensi personal yang bertugas apakah sudah sesuai dengan tuju-tujuan atau SOP dalam menerapkan implemmentasi E-Tilang Kabupaten Bojonegoro. Pentingnya kehadiran pimpinan dalam mendukung SDM yang tersedia agar Meningkatkan motivasi dan semangat personel yang terlibat dalam program E-Tilang melalui pelatihan, penghargaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif.

3. Disposisi

Kesediaan dan komitmen individu serta organisasi yang terlibat dalam implementasi E-Tilang di Kabupaten Bojonegoro sangat penting untuk keberhasilan jangka panjangnya. Dalam hal Komitmen Kepemimpinan: Mendapatkan komitmen kuat dari kepemimpinan senior untuk memprioritaskan implementasi E-Tilang dan memberikan dukungan yang diperlukan. Dari hasil wawancara dan melihat fakta di lapangan menunjukkan kejelasan dukungan dari beberapa elemen pimpinan yang mendukung ter-Implementasinya Kebijakan ETLE di Kabupaten Bojonegoro, sebab kebijakan ini merupakan kebijakan yang di implemmentasikan seluruh wilayah di Indonesia yang bertujuan secara jelas untuk menekan angka kecelakaan lewat membangun kesadaran tertib berlalu lintas terhadap masyarakat.

Selain itu dalam hal Motivasi Petugas menunjukkan bahwa perlunya Membangun budaya motivasi dan keterlibatan di antara petugas yang terlibat dalam operasi E-Tilang, dengan menekankan peran mereka dalam keselamatan jalan raya. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh petugas melakukan dengan sesuai SOP yang berlaku, maka kegiatan yang dilakukan juga sesuai jadwal yang diberikan dan ditentukan, hal ini tentunya penting mendisiplinkan petugas guna membangun motivasi ataupun etos kerja yang kuat terhadap agen implemmentasi kebijakan ETLE di kabupaten Bojonegoro.

Kerja Sama Masyarakat: Mendorong kerjasama masyarakat dengan menekankan manfaat E-Tilang untuk keselamatan jalan raya dan keamanan pribadi, dari hasil wawancara menunjukkan bahwa kerjasama secara signifikan terhadap masyarakat kurang karena peran masyarakat hanya sebatas mematuhi apa yang sudah menjadi peraturan, karena tidak memiliki wewenang di dalamnya. jadi peranan masyarakat terhadap kebijakan ini hanya sebatas mematuhi peraturan dan memiliki sikap serah selayaknya kooperator terhadap petugas.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi dan proses dalam lembaga pelaksana harus mendukung fungsi E-Tilang di Kabupaten Bojonegoro secara efektif. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran dan Tanggung Jawab yang sudah Jelas: Memperjelas peran dan tanggung jawab untuk setiap lembaga, departemen, dan individu yang terlibat dalam E-Tilang, memastikan akuntabilitas dan alokasi tugas yang efisien, dalam hal ini Dalam pelaksanaan kebijakan E-Tilang, Polisi memberikan penindakan sanksi tilang sesuai dengan mekanisme dan SOP yang ada. Fragmentasi dalam implementasi kebijakan E-Tilang yaitu terjalannya koordinasi dan pembagian tugas dari beberapa lembaga, yaitu adanya kesinergisan antar Kepolisian, DISHUB, Kejaksaan Agung, Pengadilan, dan Bank BRI dalam Integrasi Implementasi E-Tilang. Karena kebijakan ini tentunya tidak dapat berjalan sendiri, tentu membutuhkan pihak terkait dalam mesukseskan implemmentasi ini, dari hasil wawancara menunjukkan bahwa sudah terjalannya kolaboratif dan sinergitas antar beberapa elemen dalam melaksanakan kebijakan ETLE di Kabupaten Bojonegoro.

Dari segi Proses yang sudah Disederhanakan juga dengan Menerapkan proses dan prosedur yang efisien untuk menerbitkan tilang elektronik, memproses data, dan menegakkan denda, meminimalkan hambatan birokrasi. Dari implemmentasi ETLE

khusus nya di Kabupaten Bojonegoro tentu mendigitalkan proses tilang menilang dimana proses ini di lakukan secara daring sesuai dengan peraturan Undang-Undang

Dilaksanakan pula kegiatan Pemantauan Kinerja dengan Menetapkan mekanisme untuk pemantauan dan evaluasi kinerja secara teratur untuk melacak efektivitas E-Tilang, mengidentifikasi area untuk perbaikan, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Tentunya dalam sebuah kebijakan perlu melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan yang sedang di implemmentasikan guna mengidentifikasi Ketepatan sasaran target . dalam hal ini dalam LANTAS kepolisian melakukan Rapat ANEV (Analisa dan Evaluasi) guna mengidentifikasi kekurangan secara konkrit terhadap SDM yang di miliki terutama pada implemmentornya, hal ini terus dilakukan guna upaya kesungguhan implemnetasi E-TLE di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Dengan memperhatikan keempat elemen komunikasi, sumber daya, disposisi, dan pertimbangan struktural dengan menerapkan analisis Teori Edward III, implementasi E-Tilang menunjukkan keberhasilan dari segi tujuan menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas tetapi terdapat kekurangan yang harus tetap di tingkatkan seperti halnya infrastuktur , sumberdaya manusia yang berkompeten serta sosialisasi yang perlu dilakukan secara progress kedepannya, sehingga besar harapannya Implemmentasi E-Tilang di wilayah Kabupaten Bojonegoro terlaksana dengan baik serta sesuai sasaran yang sudah ditargetkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Implementasi E- Tilang Dalam Meningkatkan Disiplin Berlalu Lintas Masyarakat Kabupaten Bojonegoro, Maka dapat di Tarik kesimpulan Bahwa Implemmentasi E-Tilang sudah bisa di katakan belum maksimal berjalan di terapkan di masyarakat Kabupaten Bojonegoro karena dari data dan hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam hal ini masih ditemukan beberapa indikasi yang perlu segera di atasi , dari hasil penelitian menunjukkan beberapa hal yang kurang dan menjadi hambatan dalam Implemmentasi E-Tilang di Kabupaten Bojonegoro menurut teori Implementasi George C.Edward III di antara nya ialah :

1. Dalam hal Komunikasi terutama sosialisasi terhadap kebijakan E-Tilang kepada masyarakat di rasa masih perlu dan terus di tingkatkan untuk membangun pemahaman masyarakat terhadap E-Tilang bagaimana sistemnya dan tata cara membayar denda serta apa saja yang membedakan E-Tilang dengan Tilang Manual yang masih banyak di kenal masyarakat, karenamasih ada masyrakat yang bingung dan meragukan kebijakan E-tilang yang di terapkan, tidak lain hal ini untuk menaikkan peran masyarakat dalam implementasi serta mengurangi praktik kecurangan petugas ketika melakukan tugas tidak sesuai SOP.
2. Sumberdaya menunjukkan kurangnya Infrastuktur terutama ketersediaan komponen utama dalam penerapan E-Tilang ialah kamera Pemantau atau di sebut CCTV yang peruntukannya khusus untuk E-Tilang masih berjumlah 28 Unit atau 28 Titik yang otomatis masih belum mengakomodir seluruh wilayah cakupan Kebijakan yang masuk

pada zona mobilitas tinggi masyarakat Kabupaten Bojonegoro serta masih ada 4 titik CCTV yang dinilai vital lokasinya belum mampu beroperasi sebagai mestinya untuk mendukung implementasi E-Tilang, serta belum sepenuhnya kepercayaan masyarakat akan keberhasilan Implementasi E-tilang di Kabupaten Bojonegoro terutama kepercayaan terhadap Profesionalitas Petugas yang Manjalankan E-Tilang.

3. Variabel Disposisi menunjukkan sudah terpenuhi dalam Implementasi E- Tilang di Kabupaten Bojonegoro dimana hal ini di buktikan dengan adanya sinergitas antar lembaga yang di dukung penuh oleh pimpinan antar lembaga serta kemampuan atau kapasitas petugas yang berkompoten sesuai kualifikasi yang ada.
4. Variabel Struktur Birokrasi sudah memenuhi karena kejelasan pelaksanaan sudah ada dan sudah di atur pada SOP pelaksanaan serta sudah dilakukannya. Monitoring dan Evaluasi secara berlaku yang sudah dilaksanakan guna menunjang keberhasilan Implementasi E-Tilang di Kabupaten Bojonegoro.

Referensi

- Anggraeni, I. (2019). Pengertian Implementasi dan Pendapat Ahli. *Jurnal of Chemical Information and Modeling*.
- Armala, Y., & Yasir, M. (2022). Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro. *Hukum*, 5(1), 32–44.
- Bojonegoro, A. P. (2024). Kondisi Geografis Kabupaten Bojonegoro. *Pemkab Bojonegoro*.
- Chazali H. Situmorang, Apt, Ms. (2020). *TheJournalish : Social and Government KEBIJAKAN PUBLIK*. 1, 34–38.
- Direktorat, D. I., Lintas, L., & Polda, D. (2023). Implementasi kebijakan sistem tilang elektronik di direktorat lalu lintas (ditlantas) polda aceh.
- Fitria Nulrijansyah. (2018). Penerapan Sistem E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Pelanggar di Kabupaten Tulungagung). 1(September 2017).
- <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIA/ABLE/article/view/405>
- Januwarso, A. (2017). Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Smp Negeri Di Kabupaten Bojonegoro. *JIAN - Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 1(1), 1-9. <https://doi.org/10.56071/jian.v1i1.54>
- Nurazizah, R. H. (2019). Potensi di kabupaten bojonegoro yang perlu dikembangkan. *Jurnal Geografi*, 20(20), 1–7.
- Press, M. (2015). Analisis Jaringan Dalam Implementasi Kebijakan Teori.
- Sari, F.I. (2022). Implementasi Kebijakan Teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dalam Menciptakan Tertib Berlalu Lintas. (Studi Pada Satlantas Polresta Bandar Lampung). 1-70.
- Syafitri, E., & Mashur, D. (2022). Efektivitas Implementasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Nasional Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kota Pekanbaru. *Cross-Border*, 5(2), 1322–1337.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkatan Jalan (UU LAJ)